



K E P U T U S A N

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota *juncto* ayat 1 pasal 144 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib bahwa hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi disepakati menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- b. bahwa dalam rapat Paripurna tanggal 22 November 2022 telah menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 yang selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 Tentang majelis permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : 1. Berita Acara hasil rapat penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara BAPEMPERDA dan Biro Hukum Nomor : 160/01/BA-BAPEMPERDA/XI/2022 tanggal 08 November 2022;

2. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau tentang hasil pembahasan dan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 sebagaimana dalam Paripurna Ke-15 Masa Sidang Ketiga Tahun 2022 tanggal 22 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, terdiri dari 16 (enam belas) ranperda sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal diperlukan, DPRD dan Gubernur dapat menyampaikan Ranperda di luar Propemperda. Tata cara penyampaianya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 November 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KETUA,


JUMAGA NADEAK, SH

Tembusan :


1. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
6. Ketua-Ketua Komisi DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
7. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
9. Arsip.

Lampiran : Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 20 Tahun 2022
Tentang : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023
Tanggal : 22 November 2022

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023**

NO	JUDUL RANPERDA	OPD PEMPRAKARSA
MASA SIDANG PERTAMA (JANUARI-APRIL 2023)		
1.	Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	DPRD (BAPEMPERDA)
2.	Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
3.	Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau
4.	Ranperda tentang Pemberian Insentif Kemudahan Investasi Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
5.	Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
6.	Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau
7.	Ranperda tentang Rencana Umum Energi Daerah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau
MASA SIDANG KEDUA (MEI-AGUSTUS 2023)		
8.	Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau
9.	Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji Provinsi Kepulauan Riau	DPRD (BAPEMPERDA)
10.	Ranperda tentang Penempatan Lambang Negara dan Lambang Daerah Pada Fasilitas Pemerintahan dan Fasilitas Umum	DPRD (BAPEMPERDA)

11.	Ranperda tentang Pendirian BUMD Energi Minyak dan Gas	Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
12.	Ranperda tentang Pesantren	DPRD (BAPEMPERDA)
13.	Ranperda tentang Penyertaan Modal BUMD	Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
MASA SIDANG KETIGA (SEPTEMBER-DESEMBER 2023)		
14.	Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau
15.	Penyelenggaraan Pelayaran dan Pengelolaan Ruang laut	Dinas Perhubungan
16.	Rancangan Perda tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	DPRD (BAPEMPERDA)

Tanjungpinang, 22 November 2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KETUA,

JUMAGA NADEAK, SH

